

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan gambaran kondisi umum dan tantangan pembangunan di Provinsi Banten, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dan fokus pembangunan dalam jangka panjang.

3.1. Isu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

Dengan mencermati berbagai fenomena dan kecenderungan yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, khususnya yang terkait masalah ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, dan kesejahteraan sosial dapat diindikasikan beberapa isu pembangunan dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan, dimana 8,5% penduduk (816.742) masih tergolong dalam kategori miskin hingga tahun 2008, dengan sebaran di wilayah perkotaan sekitar 45,0% dan wilayah perdesaan 55,0%.
- b. Masih terdapatnya kantung-kantung rawan gizi buruk, terutama disebabkan karena tidak memadainya pelayanan kesehatan.
- c. Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana dari tahun 2006 hingga tahun 2008 dengan angka rata-rata lama sekolah adalah 8,1 tahun (standar nilai maksimum 15 tahun, UNDP). dan angka melek huruf masih sebesar 95,6% (standar nilai maksimum 100%, UNDP)
- d. Masih belum memadainya tingkat kesehatan masyarakat, dimana angka harapan hidup baru mencapai 66,0 tahun hingga tahun 2008 (standar nilai maksimum 85 tahun, UNDP).
- e. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2008, yang terdiri dari 91.438 jiwa PMKS.
- f. Suku Baduy sebagai komunitas adat terpencil (KAT) yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus atas keberadaan dan keberlanjutan komunitasnya.
- g. Sebanyak 764 desa atau 51,52% terhadap jumlah desa/kelurahan di Provinsi Banten tergolong dalam desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal.
- h. Kualitas SDM dan peran perempuan masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan kualitas SDM dan peran laki-laki dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2008 sebesar 62,0 (di bawah IPG Nasional 65,3), dan menempatkan Banten pada peringkat 28 dari 33 provinsi.
- i. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya semakin bertumbuhkembang seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi.
- j. Masih tingginya pertumbuhan penduduk, dimana hingga tahun 2008 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 9.602.445 jiwa. Dalam kurun waktu 2007-2008 jumlah

penduduk bertambah sebanyak 178.939 jiwa atau meningkat sebesar 2,15%. Kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah 1.065 jiwa/km².

3.2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Hingga tahun 2008, sekitar $\pm 88,0\%$ perekonomian Provinsi Banten dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah utara (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan) yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan $\pm 12,0\%$ sisanya dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) yang bertumpu pada sektor primer.
- b. Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dimana nilai ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2008, dapat diklasifikasikan dalam '*daerah sangat berkembang*' (Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangsel), dan Kota Tangerang) dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.35,12–44,69 trilyun), '*daerah berkembang*' (Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.10,73–18,01 trilyun) serta '*daerah sedang berkembang*' (Kota Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang) dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.4,36–6,94 trilyun).
- c. Ketidakseimbangan minat tujuan investasi, dimana samapi dengan tahun 2008 sekitar 97,40% nilai proyek investasi PMA dan 86,41% nilai proyek investasi PMDN berlokasi di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
- d. Orientasi investasi belum bertumpu pada sumberdaya lokal, dimana sektor usaha yang diminati melalui investasi masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, dan industri tekstil.
- e. Belum optimalnya nilai tambah sektor tersier dan sektor primer, dimana tercermin dari kontribusi ekonomi sektor tersier yang masih sebesar 38,95% dan sektor primer sebesar 8,5%.
- f. Belum optimalnya peran sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor sekunder dengan kontribusi ekonomi 52,56% hanya menyerap tenaga kerja 19,24%, sektor tersier dengan kontribusi ekonomi 38,95% menyerap tenaga kerja 41,12%, sedangkan sektor primer yang kontribusi ekonominya hanya sebesar 8,5% mampu menyerap tenaga kerja 22,16%.
- g. Masih tingginya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal, dimana hingga tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih sebesar 6,8%, dan komposisi penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan masih menunjukkan proporsi 93,7% berpendidikan non sarjana (tamat SLTA hingga tidak sekolah).
- h. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, dimana hingga tahun 2008 indeks daya beli masyarakat baru mencapai

56,4 (standar nilai maksimum 100, UNDP). Sedangkan angka gini ratio pada tahun 2008 masih sebesar 0,30.

3.3 Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional dan Internasional serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Perlunya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bandar dan pelabuhan yang terdapat di Provinsi Banten (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Bandara Soetta, Pelabuhan Perikanan, dll), sebagai gerbang inlet dan outlet distribusi barang (eksport-impor) dan penumpang, baik dalam lingkup nasional dan internasional.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang belum terpadu dan solid dalam upaya pengembangan Pelabuhan Internasional Bojonegara dan Pengembangan KEK Bojonegara, baik antar instansi pemerintah secara vertikal atau horisontal, maupun antara pemerintah dengan pihak swasta (investor).
- c. Ketidakmerataan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang menghambat upaya percepatan pemerataan pembangunan, dimana tingkat ketersediaan jaringan jalan negara dan provinsi di wilayah utara (0,33 km/km²) lebih memadai daripada di wilayah selatan (0,26 km/km²).
- d. Pengelolaan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga) masih belum terpadu, dimana pelayanan sarana angkutan umum umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan, jaringan kereta api belum menyentuh langsung pada bangkitan perjalanan (seperti kawasan industri, bandar udara, serta jalur padat yang melayani angkutan komuter) disertai dengan frekuensi layanan yang masih terbatas, kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, rendahnya disiplin masyarakat pengguna jalan, profesionalitas aparat dan operator transportasi, hingga meningkatnya kemacetan dan kecelakaan dalam penyelenggaraan transportasi.
- e. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan pertanian, dimana jaringan irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pengelolaan provinsi, hingga tahun 2008 sekitar 20,68% rusak berat (tidak dapat beroperasi), 18,41% rusak ringan, dan 60,91% dalam kondisi baik.
- f. Kondisi rasio elektrifikasi diluar Tangerang hingga tahun 2008 adalah 72,6%, namun demikian rasio elektrifikasi Banten relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Nasional sebesar 64,3%, serta rasio elektrifikasi Jawa Barat sebesar 61,5%.
- g. Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72% rumah tangga hingga tahun 2008.
- h. Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79% rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23% rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m². Masih terdapat 29,00% rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar

30,20%. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

3.4 Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang, dimana koordinasi penataan ruang belum berjalan secara antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun dengan wilayah perbatasan belum berjalan baik, belum selarasnya rencana tata ruang wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan wilayah perbatasan, serta rencana tata ruang yang masih berorientasi pada wilayah daratan.
- b. Belum memadainya operasionalisasi atas penetapan fungsi-fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Termasuk belum memadainya kesiapan provinsi dalam mendukung Kawasan Bojonegara untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
- c. Rasio realisasi pemanfaatan dan rencana pada luas kawasan budidaya dan luas kawasan lindung secara akumulatif hingga tahun 2008 adalah sebesar 109,12% dan 78,87%. Hal ini ditandai dengan beberapa peruntukan lahan yang terkonversi yaitu: 5.566 ha (sawah), 3.841 ha (tegalan), 1.228 ha (pertambakan), dan 1.530 ha (hutan)
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air, dimana kerusakan sungai terjadi pada 3 Wilayah Sungai (WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea-Cikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung), sungai lintas kabupaten/kota dalam kondisi rusak sebesar 19,54%, pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, dan sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangun-bangunan irigasi.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dimana beberapa potensi sumberdaya mineral hingga saat ini belum diusahakan seperti tras, batu apung, besi dan andesit. Sumber daya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: sumberdaya energi fosil (batubara), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap baru memanfaatkan 82,09% dari potensi lestariannya (wilayah perairan Kabupaten Pandeglang). Potensi sumberdaya perikanan budidaya, meliputi budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta potensi lahan tambak baru dimanfaatkan sekitar 78,8%. Hingga saat ini telah diidentifikasi 60 obyek wisata kategori alam, dan sebagian besar belum dikembangkan.
- f. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan limbah berbau, beracun dan berbahaya.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta rendahnya penegakan hukum lingkungan.
- h. Semakin meningkatnya ancaman bencana alam.

3.5 Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
- b. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah.

- c. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme apartur pemerintah daerah.
- d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
- e. Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif.
- f. Pembentukan daerah otonom baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- g. Perlunya pemeliharaan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
- h. Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.
- i. Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilu presiden, dan pilukada.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode jangka panjang (*long term*). Dalam arti lain, dokumen RPJPD ini memuat arahan dan kebijakan bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten dalam periode jangka menengah (*mid term*) dan jangka pendek (*short term*) . Oleh karena itu, keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan antara ketiga dokumen tersebut harus berartikulasi dan saling mendukung.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten di masa mendatang, maka sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan taget-target makro pembangunan Provinsi Banten hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Estimasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN 2008	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,82	6,5 – 6,8	6,8 – 7,0	7,0 – 7,4	7,4 – 7,8
2.	PDRB a.d.h. Berlaku	Rp. Trilyun	122,497	180,68	282,96	430,13	548,88
3.	PDRB a.d.h. Konstan	Rp. Trilyun	68,83	87,75	119,95	166,24	203,60
4.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	12,76	17,14	24,52	34,12	45,06
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.602.445	10.501.425	11.526.493	12.626.715	13.164,799
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,15	2,00	1,86	1,71	1,62
7.	Persentase Pengangguran Terbuka	%	6,8	5,6 – 5,2	5,2 – 4,8	4,8 – 4,4	4,4 – 4,0
8.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	816.742	650.000 – 600.000	600.000 – 550.000	550.000 – 500.000	500.000 – 450.000
9.	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	33,04	25,0 – 23,0	20,0 – 15,0	15,0 – 10,0	10,0 – 5,0
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,7	72,88	75,48	78,08	80,08

Asumsi :
 • Terjaganya stabilitas moneter;
 • Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif;
 • Tidak terjadi bencana dengan skala yang besar;
 • Inflasi YOY berada dibawah 7,5%;
 • Adanya komitmen bersama seluruh stakeholders.
 Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dengan mempertimbangkan target angka dan nilai estimasi dari beberapa indikator makro pembangunan tersebut, maka dalam dua puluh tahun mendatang dapat diperkirakan beberapa kondisi yang akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 2.2
Estimasi Kondisi Makro Pembangunan Provinsi Banten

NO	KOMPONEN	ASUMSI/ STANDAR	SATUAN	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Kebutuhan Pangan	120 Kg/Jiwa/Th	Ton	1.260.171	1.383.179	1.515.206	1.579.776
2.	Kebutuhan Perumahan	1 Unit/KK	Unit	2.100.285	2.305.298	2.525.343	2.632.960
3.	Kebutuhan Air Bersih	120 Lit/Jiwa/Hari	Liter	1.260.171.013	1.383.179.181	1.515.205.910	1.579.775.997
4.	Kebutuhan Listrik	0,15 KVA/Jiwa	KVA	1.575.214	1.728.974	1.894.008	1.974.720
5.	Timbulan/Pro-duksi Limbah	2,5 Lit/Jiwa/Hari	Liter	26.253.563	28.816.233	31.566.790	32.912.000

Sumber : Hasil Analisis, 2008